



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 - 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 103 /RSUD-2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 800/080 /RSUD-2017 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan bertambahnya kegiatan di perubahan Anggaran Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seperti tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini.
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Nomor : 800/080 /RSUD-2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2017.

: Tugas dan Kewajiban Pemimpin Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya.
2. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomi dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawab.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin permasalahan yang timbul dilapangan.
6. Wajib membuat laporan Kemajuan Pekerjaan baik fisik dan Keuangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017 ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Oktober 2017

DIREKTUR,


H. BUSRIL

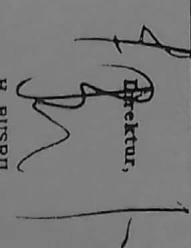
Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri UP. Dirjen OTDA di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Barat (Cq. Biro Keuangan) di Padang
4. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Kantor Wilayah DJA di Padang.
6. Pimpinan BPD Wilayah DJA di Padang.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
9. Kepala KPKN Painan di Painan
10. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
11. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
12. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Painan di Painan
13. Pertinggal.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI		JABATAN		JURUSAN		PROGRAM DAN KEGIATAN		SUB KEGIATAN YANG DIRELEVA		KIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Bay Evon Karmila, S.SiT NIP. 197408152005012010	Penyusun Administrasi Diklat	PPTK	INSTALASI GIZI	1	Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan gizi	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
				PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan	1	Bimtek Simulasi Penguatanganan Bencana	1		
5	Herizal Harpen, S. Kom NIP. 197007152010011004	Ka. Instalasi IT	PPTK	Manajemen Peralatan Umum Manajemen Peralatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur SIMRS Administrasi RS Pendukung Pelayanan Pengadaan Peralatan Pendukung Pelayanan /Peningkatan Pelayanan Manajemen Peralatan Umum	3	Pendukung Pelayanan Pengadaan Peralatan Umum	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					1	Pendukung Pelayanan Umum	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					2	Pendukung Pelayanan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					3	Pendukung Pelayanan /Peningkatan Pelayanan SIMRS	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					4	Peningkatan Pelayanan Administrasi RS	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					5	Pengadaan Mobilier	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					6	Pembangunan SIM RS Rumah Sakit	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
					7	Pendukung Pelayanan Pengadaan Peralatan Umum	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	1		
6	Enda Gusnita, SKM NIP. 19870823 201001 2023	Staf Kepegawaian	PPTK	Administrasi RS	1	Peningkatan Pelayanan Administrasi RS	1	Honor Non PNS	1		
					2	Inventif Jaga	2	Analisa Jabatan dan Analisa Kepeg	2		
7	Erman, S. Kom NIP. 197310312008041001	PPTK	PPTK	Administrasi RS	1	Peningkatan Pelayanan Administrasi RS	1	Pengadaan ATK	1		
					2	Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran	2		2		

Name / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	UNIT PENDUKUNG TEKNIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB. KEGIATAN YANG DIKELOLA	RET
2	3	4		5	6	7
Yelly Haeza, Amd. Kep Nip. 19830704 201101 2 010		PPTK	PROMOSI KESEHATAN	1 Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan Promosi Kesehatan	3 Pengadaan Material dan Perangkat 4 Pengadaan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar 1 Pengadaan media promosi informasi RS dan Peningkatan Keluhan Partisipasi Pameran	
Yusnelmi, SH NIP. 196202181985032002		PPTK	Manajemen Keuangan	1 Pendukung Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	1 Pengelolaan Keuangan BLUD	
Titi Oktavia, SH, MM NIP. 197310121993032002		PPTK	Manajemen Keuangan	1 Pendukung Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	1 Penyusunan SOP Keuangan dan Kebijakan Akuntansi 2 Audit Keuangan BLU Independen	
Wery Ester Velmi, SE, AK NIP. 198011232009022008		PPTK	Manajemen Keuangan	1 Pendukung Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	1 Jasa hasil Pelayanan 2 Penyusunan Penyusunan Perhitungan Unit Cost dan Pola Pelayanan Rujukan ambulance	
NS. Zalyar Effita, M. Kep NIP. 197102211995032001		PPTK	IGD Manajemen Pelayanan	1 Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan IGD 2 Peningkatan Manajemen Pelayanan RS	1 Rujukan Parsial 2 Penyusunan SOP Pelayanan RSUD 3 Evaluasi Clinical Path Way	
Ne. Adek Imelda Syam, S.Kep NIP. 197708072002122003		PPTK	Unit Transfusi Darah Pemulasaran Jenazah Manajemen Pelayanan	3 Pendukung Pelayanan Unit Transfusi Darah 4 Pendukung Pelayanan pemulasaran jenazah 1 Peningkatan Manajemen Pelayanan RS	1 Penunjang Transfusi Darah 1 Penunjang pemulasaran jenazah 1 Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dan 2 Penilaian Akreditasi 3 Penyusunan Hospital by Laws Rumah Sakit 4 Lomba	
Bernan Sagala, AMTE NIP. 198207162009022005		PPTK	IPSRs	1 Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan IPSRS	1 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 2 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Genet Rumah Sakit 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Komponen Alat 4 Pemeliharaan Alat Kantor dan Perlengkapan Kantor	
Zetki Mularino, Amd. TEM		PPTK	RADIOLOGI	1 Pengadaan Alat dan Radiologi/ Peningkatan Mutu Layanan	1 Bahan Radiologi	

No		Nama		Jenis Pekerjaan		Kategori Pekerjaan		Sifat Pekerjaan		Masa Kerja	
5											
6											
8											


 Direktur,
 H. BUSRI